

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Riewanto *et al.* *Hukum Tata Negara*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023).

Erfandi. *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2014).

Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: STPN Press, 2017).

Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017).

Ilmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018).

Kansil, C.S.T. *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*. (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1986).

Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015).

Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. (Setara Press: Kota Malang, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

- Rahman, A. H.I. *Sistem Politik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Sabaroedin Tk. B., R. Kranenburg. *Ilmu Negara Umum*. Cetakan Kesebelas. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).
- Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sri Mamudji *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan Pertama. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Sri Soemantri. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo 1992).
- Susanti, Dyah Ochtorina *et al.* *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan pertama. (Jakarta: Konpress, 2020).

Jurnal

- Ahmad Nur Ansari, Suhadirman Syamsu, Dian Ekawaty. "Relevansi *Parliamentary Threshold* dan Sistem Kepartaian di Indonesia". *Palita: Journal of Social Religion Research*. Vol. 7, No. 1. 2022.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 4. 2019.

- Anisah, Teta. "Dinamika Pengaturan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 2019.
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 2. 2021.
- Darussalim. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Bawaslu Provinsi Riau". *Skripsi Universitas Islam Riau*. 2019.
- Fachrianto Hanief. "*Penerapan Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia". *Skripsi Universitas Airlangga*. 2017.
- Fatih, Sholahuddin Al-. "Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota". *Jurnal Ahkam*. Vol. 6, No. 2. 2019.
- Fatih, Sholahuddin Al-. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013". *Jurnal Yudisial*. Vol. 12, No. 1. 2019.
- Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty*, Vol. 1, No. 2. 2022.
- Hakim, Rafly, dan Muhammad Evan Kurnia. "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat". *Jurnal Relasi Publik*. Vol. 1, No. 2. 2023.
- Hamid, Ali Aminuddin, Sujarwo, dan Agoes Moenawar. "Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Orde Baru". *Jurnal de jure*. Vol. 14, No. 1. 2022.

- Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum." *Jurnal HAM*. Vol. 10, No. 2. 2019.
- Nurdin dan Syauiid Alamsyah. "Penerapan Sistem Kepartaian di Indonesia dan Jerman Dalam Persepektif Perbandingan Politik". *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol. 1, No. 2, 2023.
- Patrico Firmansyah Tjandring. "Problematika Ketidakadilan Pengaturan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia". *Skripsi Universitas Nusa Cendana*. 2022.
- Rakhbir Singh dan Taufiqurrohman Syahur. "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. Vol. 2, No. 7, 2023.
- Syamsudin. "Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Tesis Universitas Borneo Tarakan*. 2022.
- Umam, Khairul, Ashari, dan Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila". *JATISWARA*. Vol. 38, No. 2. 2023.
- Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Vol. 4, No. 2. 2022.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran*

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).*

_____. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).*

_____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).*

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional serta Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi atau Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.*

_____. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.*

_____. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.*

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Internet

Tri Meilani Ameliya. "Tata kelola pemerintahan inklusif dan penguatan keberagaman di daerah". <https://www.antaranews.com/berita/2825421/tata-kelola-pemerintahan-inklusif-dan-penguatan-keberagaman-di-daerah>, 20 Desember 2024.

Dwi Andayani. "Suara Parpol yang Tak Lolos Parlemen akan Hangus, begini aturannya". <https://news.detik.com/berita/d-4165432/suara-parpol-tak-lolos-parlemen-akan-hangus-begini-aturannya>, 20 Desember 2024.

Qotrun A. "Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, 10 September 2024.

Ady Thea DA. "Putusan MK Tentang Parliamentary Threshold Sejalan dengan Konstitusi". <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/>, 10 September 2024.

Tri Jata Ayu Pramesti. "Fungsi Partai Politik". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-partai-politik-lt550a445c6466c/>, 28 November 2024.

Tim Hukumonline, "Fungsi, Tujuan, Asas Pemilu". <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilult64956cc40a99a/>, 19 Desember 2024.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring (Dalam Jaringan). <https://kbbi.web.id/terap-2>, 10 September 2024.

Komisi Pemilihan Umum. “Peserta Pemilu”. <https://www.kpu.go.id/page/read/1129/peserta-pemilu>, 10 September 2024.

Fitria Chusna Farisa dan Bayu Galih. “Ketentuan Ambang Batas Parlemen di UU Pemilu Digugat ke MK”. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/09362411/ketentuan-ambang-batas-parlemen-di-uu-pemilu-digugat-ke-mk?page=all>, 10 September 2024.

Fitria Chusna Farisa. “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Distrik Berwakil Banyak di Indonesia”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/19335961/sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dan-distrik-berwakil-banyak-di-indonesia?page=all>, 20 Desember 2024.

Topan Yuniarto. “Parliamentary Threshold dan Ambang Batas Suara di Parlemen”. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparantopik/parliamentary-threshold-ambang-batas-parlemen-dalam-pemilu-di-indonesia>, 20 November 2024.

Silvia Estefina Subitmele. “Pemilu Legislatif adalah Momen Penting dalam Sistem Demokrasi, simak perbedaannya”. <https://www.liputan6.com/hot/read/5507320/pemilu-legislatif-adalah-momen-penting-dalam-sistem-demokrasi-simak-perbedaannya?page=3>, 10 September 2024.

Maksum Rangkuti. “Mahkamah Konstitusi: Tugas dan Kewajiban”. <https://fahum.umsu.ac.id/mahkamah-konstitusi-tugas-dan-kewajiban/>, 20 Desember 2024.

Tempo. “KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih PKB di Tengah Gugatan terhadap Cak Imin, Apa Alasannya?”. <https://www.tempo.co/politik/kpu-ganti-5-anggota-dpr-terpilih-pkb-di-tengah-gugatan-terhadap-cak-imin-apa-alasannya--6816>, 20 Desember 2024.